



GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 97 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PERANGKAT DAERAH DAN KELAS JABATAN YANG
MENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA BERDASARKAN KONDISI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kriteria Kondisi Kerja dapat diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Perangkat Daerah dan Kelas Jabatan Yang Menerima Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Kondisi Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah...../2

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
19. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 1);
20. Peraturan Gubernur...../4

20. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Satuan Perangkat Daerah dan Kelas Jabatan Yang Menerima Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Kondisi Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah sehubungan dengan melaksanakan tugas pada jabatan pekerjaan ini beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegakan hukum.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung bulan Januari 2024.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 2 Juli 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H
NIP. 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Tenaga Kerja RI di Jakarta;
2. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire.

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 97 TAHUN 2024
TENTANG : PENETAPAN PERANGKAT DAERAH DAN
KELAS JABATAN YANG MENERIMA
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA
BERDASARKAN KONDISI KERJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
PAPUA TENGAH

JABATAN DAN PERANGKAT DAERAH

NO.	NAMA JABATAN	UNIT KERJA
1.	Sekretaris Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
2.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	SEKRETARIAT DAERAH
3.	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat	SEKRETARIAT DAERAH
4.	Kepala Biro Hukum	SEKRETARIAT DAERAH
5.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan,	SEKRETARIAT DAERAH
6.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	SEKRETARIAT DAERAH
7.	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	SEKRETARIAT DAERAH
8.	Asisten Bidang Administrasi Umum	SEKRETARIAT DAERAH
9.	Kepala Biro Organisasi	SEKRETARIAT DAERAH
10.	Kepala Biro Umum	SEKRETARIAT DAERAH
11.	JF Analis Kebijakan Pertama	SEKRETARIAT DAERAH
12.	JF Analis Hukum Pertama	SEKRETARIAT DAERAH
13.	JF Analis Hukum Muda	SEKRETARIAT DAERAH
14.	JF Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama	SEKRETARIAT DAERAH
15.	JF Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda	SEKRETARIAT DAERAH
16.	JF Analis Kebijakan Pertama	SEKRETARIAT DAERAH

17.	JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	SEKRETARIAT DAERAH
18.	JF Analis Kebijakan Pertama	SEKRETARIAT DAERAH
19.	Sekretaris Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	SEKRETARIAT DAERAH
20.	JF Analis Kebijakan Pertama	SEKRETARIAT DAERAH
21.	JF Analis Kebijakan Pertama	SEKRETARIAT DAERAH
22.	JF Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	SEKRETARIAT DAERAH
23.	JF Pranata Hubungan Masyarakat Muda	SEKRETARIAT DAERAH
24.	JF Analis Kebijakan Pertama	SEKRETARIAT DAERAH
25.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Papua	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH
26.	JF Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH
27.	JF Pranata Hubungan Masyarakat Muda	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH
28.	JF Analis Hukum Pertama	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH
29.	JF Analis Hukum Muda	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH
30.	JF Perisalah Legislatif Pertama	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH
31.	JF Perisalah Legislatif muda	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH
32.	JF Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH
33.	JF Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH
34.	JF Analis Kebijakan Pertama	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH
35.	Inspektur	INSPEKTORAT
36.	Sekretaris Inspektorat	INSPEKTORAT
37.	Kepala Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan	INSPEKTORAT

38.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	INSPEKTORAT
39.	Kepala Inspektur Pembantu I	INSPEKTORAT
40.	Kepala Inspektur Pembantu II	INSPEKTORAT
41.	Kepala Inspektur Pembantu III	INSPEKTORAT
42.	Kepala Inspektur Pembantu IV	INSPEKTORAT
43.	JF Auditor Pertama	INSPEKTORAT
44.	JF Auditor Utama	INSPEKTORAT
45.	JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Pertama	INSPEKTORAT
47.	JF Auditor Pertama	INSPEKTORAT
48.	JF Auditor Utama	INSPEKTORAT
49.	JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Pertama	INSPEKTORAT
50.	JF Auditor Pertama	INSPEKTORAT
51.	JF Auditor Utama	INSPEKTORAT
52.	JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Pertama	INSPEKTORAT
53.	JF Auditor Pertama	INSPEKTORAT
54.	JF Auditor Utama	INSPEKTORAT
55.	JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Pertama	INSPEKTORAT
56.	JF Analis Kebijakan Pertama	INSPEKTORAT
57.	Sekretaris Majelis Rakyat Papua	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA TENGAH
58.	JF Analis Kebijakan Pertama	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA TENGAH
59.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
60.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
61.	JF Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
62.	JF Pamong Budaya Pertama	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

63.	JF Pamong Budaya Muda	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
64.	JF Pengawas Sekolah Muda	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
65.	JF Penilik Pertama	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
66.	JF Penilik Muda	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
67.	JF Guru Pertama	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
68.	JF Guru Muda	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
69.	JF Analis Kebijakan Pertama	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
70.	JF Analis SDM Aparatur Pertama	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
71.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
72.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
73.	JF Pengelola Sumber Daya Air Pertama	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
74.	JF Pengelola Sumber Daya Air Muda	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
75.	JF Penata Ruang Pertama	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
76.	JF Penata Ruang Muda	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
77.	JF Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Pertama	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
78.	JF Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Muda	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
79.	JF Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Pertama	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
80.	JF Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Muda	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
81.	JF Penata Laksana Sumber Daya Air Penyelia	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
82.	JF Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Penyelia	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
83.	JF Penata Laksana Penyehatan Lingkungan Penyelia	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
84.	JF Penata Kelola Jalan dan Jembatan Pertama	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
85.	JF Penata Kelola Jalan dan Jembatan Pertama	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
86.	JF Penata Kelola Perumahan Pertama	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

87.	JF Penata Kelola Perumahan Muda	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
88.	JF Analis Kebijakan Pertama	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
89.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERTANAHAN
90.	JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERTANAHAN
91.	JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERTANAHAN
92.	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERTANAHAN
93.	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERTANAHAN
94.	JF Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERTANAHAN
95.	JF Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERTANAHAN
96.	JF Polisi Kehutanan Muda	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERTANAHAN
97.	JF Polisi Kehutanan Penyelia	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERTANAHAN
98.	Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
99.	JF Polisi Pamong Praja Muda	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
100.	JF Polisi Pamong Praja Pertama	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
101.	JF Polisi Pamong Praja Penyelia	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
102.	JF Pemadam Kebakaran Penyelia	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

103.	JF Analis Kebakaran Pertama	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
106.	JF Analis Kebakaran Muda	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
107.	JF Pranata Pencarian dan Pertolongan Mahir	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
108.	JF Pranata Pencarian dan Pertolongan Penyelia	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
109.	JF Analis Kebencanaan Pertama	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
110.	JF Analis Kebencanaan Muda	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
111.	JF Penata Penanggulangan Bencana Pertama	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
112.	JF Penata Penanggulangan Bencana Muda	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
113.	JF Analis Kebijakan Pertama	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
114.	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik, Dan Persandian	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
115.	JF Pranata Komputer Penyelia	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
116.	JF Pranata Komputer Pertama	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
117.	JF Pranata Komputer Muda	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN

118.	JF Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
119.	JF Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
120.	JF Pranata Hubungan Masyarakat Muda	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
121.	JF Sandiman Mahir	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
123.	JF Sandiman Penyelia	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
124.	JF Sandiman Pertama	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
125.	JF Statistisi Pertama	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
126.	JF Statistisi Muda	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
127.	JF Manggala Informatika Pertama	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
128.	JF Analis Kebijakan Pertama	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
129.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
130.	JF Pengawas Koperasi Pertama	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
131.	JF Pengembang Kewirausahaan Pertama	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
132.	JF Pengembang Kewirausahaan Muda	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
133.	JF Penera Penyelia	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
134.	JF Penera Ahli Pertama	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
135.	JF Penera Ahli Muda	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN

		PERDAGANGAN
136.	JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pertama	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
137.	JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Muda	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
138.	JF Analis Perdagangan Ahli Pertama	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
139.	JF Pengawas Perdagangan Ahli Pertama	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
140	JF Analis Kebijakan Pertama	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
141.	Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN
142.	Kepala Subbagian Program dan Anggaran	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN
143.	JF Analis Ketahanan Pangan Pertama	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN
144.	JF Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pertama	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN
145.	JF Analis Akuakultur Pertama	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN
146.	JF Analis Akuakultur Muda	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN
147.	JF Penyuluh Pertanian Muda	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN
148.	JF Penyuluh Pertanian Pertama	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN
149.	JF Penyuluh Pertanian Penyelia	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN
150.	JF Medik Veteriner Madya	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN
151.	JF Medik Veteriner Muda	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN
152.	JF Medik Veteriner Pertama	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN
153.	JF Para Medik Veteriner Pelaksana	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN
154.	JF Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Madya	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN
155.	JF Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN

156.	JF Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN
157.	JF Analis Pasar Hasil Pertanian Muda	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN
158.	JF Analis Pasar Hasil Pertanian Pertama	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN
159.	JF Pengawas Alat Dan Mesin Pertanian Pertama	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN
160.	JF Analis Prasarana Dan Sarana Pertanian Madya	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN
161.	JF Analis Prasarana Dan Sarana Pertanian Pertama	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN
162.	JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN
163.	JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN
164.	JF Pengawas Benih Tanaman Muda	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN
165.	JF Pengawas Benih Tanaman Pertama	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN
166.	JF Analis Kebijakan Pertama	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN
167.	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
168.	JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Pertama	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
169.	JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Muda	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
170.	JF Penyuluh Keluarga Berencana Muda	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
171.	JF Penyuluh Keluarga Berencana Pertama	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
172.	JF Penyuluh Keluarga Berencana Penyelia	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
173.	JF Administrator Kesehatan Muda	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
174.	JF Administrator Kesehatan Pertama	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
175	JF Analis Kebijakan Pertama	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
176.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI , ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

177.	JF Pengantar Kerja Pertama	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI , ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
178.	JF Mediator Hubungan Industrial Pertama	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI , ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
179.	JF Instruktur Muda	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI , ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
180.	JF Instruktur Pertama	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI , ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
181.	JF Penyelidik Bumi Muda	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI , ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
182.	JF Penyelidik Bumi Pertama	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI , ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
183.	JF Analis Kebijakan Pertama	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI , ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
184.	JF Inspektur Tambang Muda	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI , ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
185	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
186.	JF Pekerja Sosial Penyelia	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
187.	JF Pekerja Sosial Pertama	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
188.	JF Pekerja Sosial Muda	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
189.	JF Penyuluh Sosial Pertama	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
190.	JF Penyuluh Sosial Muda	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
191.	JF Analis Kebijakan Pertama	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
192.	Kepala Dinas Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN
193.	JF Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia	DINAS PERHUBUNGAN

194.	JF Analis Kebijakan Pertama	DINAS PERHUBUNGAN
195.	Kepala Dinas Kepemudaaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DINAS KEPEMUDAAN, OLAKHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
196.	JF Adyatama Kepariwisataaان dan Ekonomi Kreatif Pertama	DINAS KEPEMUDAAN, OLAKHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
197.	JF Pelatih Olahraga Pertama	DINAS KEPEMUDAAN, OLAKHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
198.	JF Pelatih Olahraga Muda	DINAS KEPEMUDAAN, OLAKHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
199.	JF Analis Kebijakan Pertama	DINAS KEPEMUDAAN, OLAKHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
200.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
201.	JF Penata Kelola Penanaman Modal Pertama	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
202.	JF Penata Kelola Penanaman Modal Muda	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
203.	JF Penata Perizinan Pertama	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
204	JF Penata Perizinan Muda	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
205.	JF Analis Kebijakan Pertama	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
206.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
207.	JF Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Penyelia	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
208.	JF Administrator Database Kependudukan Pertama	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
209.	JF Administrator Database Kependudukan Muda	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
210	JF Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

211.	JF Penggerak Swadaya Masyarakat Muda	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
212.	JF Analis Kebijakan Pertama	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
213.	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
214.	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Pertama	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
215.	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
216.	JF Analis Anggaran Pertama	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
217.	JF Analis Kebijakan Pertama	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
218.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
219.	JF Analis Kebijakan Pertama	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
220.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
221.	JF Perencana Pertama	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
222.	JF Peneliti Pertama	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
223.	JF Peneliti Muda	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
224.	JF Perekayasa Pertama	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
225.	JF Perekayasa Muda	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
226.	JF Analis Kebijakan Pertama	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
227.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
228.	JF Analis SDM Aparatur Pertama	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
229.	JF Pranata SDM Aparatur Penyelia	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER

231.	JF Pranata Komputer Pertama	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
232.	JF Pranata Komputer Muda	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
233	JF Analis Kebijakan Pertama	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YUBIUS MANURUNG, SH., M.H
NIP. 197606082002121002

